

Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

HUSEN ACHMAD SYAWIE¹, GRACE B. NANGOI², LINTJE KALANGI³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
email:syawiehusen@yahoo.com

***Abstract.** This study aims to determine the effect of understanding of financial management, regional financial accounting system, internal control effectiveness of financial performance at the Regional Government of East Bolaang Mongondow Regency. This is a quantitative research. Population in this research was all Local Government Device Unit (LGDU) of Regency in Bolaang Mongondow Timur Regency. 64 respondents were chosen from the population. They are financial managers and staff in LGDU of East Bolaang Mongondow Regency Government. Data were collected by questionnaires. The research employed multiple regression analysis and utilized SPSS version 22. The results show that the understanding of financial management does not affect significantly the financial performance of LGDU at East Bolaang Mongondow Regency Government. Regional financial accounting system and effectiveness of internal control have significant effect on the financial performance of LGDU at East Bolaang Mongondow Regency Government.*

***Keywords:** Understanding of Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System, Effectiveness of Internal Monitoring and Financial Performance of Local Government.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pengaruh pemahaman pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, efektifitas pengawasan intern terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, responden dalam penelitian ini berjumlah 64 responden selaku pengelola keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengelolaan keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sistem akuntansi keuangan daerah dan efektifitas pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kata Kunci: Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Efektivitas Pengawasan Intern, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Karakteristik yang menunjukkan perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah paska reformasi keuangan daerah adalah bagaimana pemahaman yang mendasar terhadap tata kelola keuangan daerah, sistem pengendalian intern untuk menjamin tindakan manajemen dalam rangka informasi yang transparan tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya juga perubahan yang mendasar terhadap sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat propinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat.

Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal

oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan yang terjadi (Arens, 2003). Suwardjono (2005:159) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi Negara. Salah satu tujuan ekonomi Negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien, sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

Uraian pada paragraph sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam alokasi sumber daya ekonomi harus diperuntukan untuk kepentingan publik dan proses alokasi sumber daya perlu dikontrol atau diawasi. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengontrol kebijakan pemerintah adalah teknik akuntansi. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku (Suwardjono, 2005:159). Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji laporan keuangan. Ketentuan tersebut menuntut pemahaman yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah, pemahaman yang memadai tentang sistem pengendalian intern termasuk penguasaan tentang teknik-teknik akuntansi keuangan daerah.

Dalam situasi tertentu sistem pengendalian intern, serta akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya bahwa dari sekian banyak masalah yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing satuan kerja perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan masalah akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Mardiasmo (2002:35) menegaskan sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Pemahaman terhadap pengelolaan keuangan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan sangat diperlukan, sementara penggunaan sistem akuntansi berbasis komputer sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pelaporan dan aktivitas pengawasan merupakan faktor yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk laporan keuangan maka setiap para pengguna, harus memiliki kompetensi/pengetahuan yang memadai dibidang tersebut serta dibidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya komponen sistem pengendalian intern dalam menopang terwujudnya penyusunan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Walaupun telah mengacu pada aturan yang ada tetapi masih terdapat kurangnya pemahaman atas pengelolaan keuangan yang berdasarkan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana yang diharapkan yakni Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta aktivitas pengawasan intern yang meliputi seluruh aspek dari 5 (lima) unsur yang sesuai pandangan COSO. 5 aspek tersebut berpengaruh pada kinerja keuangan setiap SKPD di pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 BPK tidak memberikan pendapat (*No Opinion*) karena adanya masalah-masalah seperti (1) pencatatan persediaan yang tidak memadai, (2) aset tetap peralatan dan mesin tidak dapat ditunjukkan dan dijelaskan keberadaannya, (3) utang kepada pihak ketiga belum disajikan pada neraca per 31 desember 2011, (4) honorarium PNS dan Non PNS tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai, (5) belanja perjalanan dinas yang diragukan yang diragukan keabsahannya, (6) realisasi jalan, irigasi dan jaringan tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan per 31 desember 2011. Untuk tahun 2013 Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK menyatakan opini bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, telah menyajikan secara wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah tanggal 31 Desember 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sementara untuk tahun 2014 Badan pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan

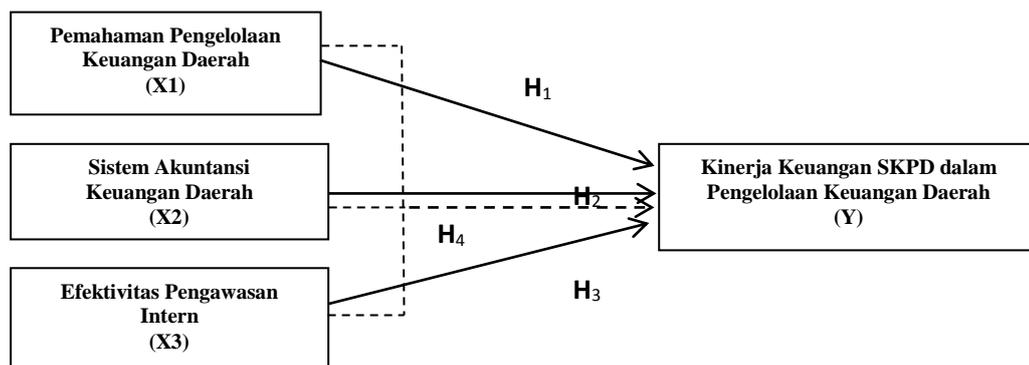
opini kepada Bolaang mongondow Timur terkait pelaporan keuangan 2014 di berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur?
3. Apakah efektivitas pengawasan intern pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur?
4. Apakah pemahaman pengelolaan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan daerah serta efektivitas pengawasan intern pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris semua rumusan masalah yang ada. Manfaat penelitian Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan dan *auditing* khususnya pengelolaan keuangan daerah; bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah; bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi 4 (empat) hipotesis:

1. Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan SKPD

Menurut Mardiasmo (2004), pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Abdul (2008) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi. Erna Sari, dkk (2013) menunjukkan hasil bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah.

H₁: Pemahaman pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD.

2. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan SKPD

Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan

yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Hidayat (2015) menunjukkan hasil bahwa, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, juga sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₂: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan SKPD.

3. Pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja keuangan SKPD

Freeman (2003:71) menegaskan bahwa pada instansi pemerintah anggaran digunakan sebagai alat pengawasan. Hal ini menandakan pengawasan yang dilaksanakan terhadap penggunaan anggaran yang tercermin dalam APBD merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh eksekutif merupakan pengawasan internal yang dimaksudkan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran. Abdul (2009) mengatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan membantu paraanggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Almada Primadona (2010) menunjukkan hasil bahwa Diantara variabel independen, pengawasan intern memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas di wilayah Kota Bandung. Pengawasan intern daerah secara parsial memberikan pengaruh sebesar 19.2% terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara parsial pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai.

H₃: Efektivitas pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD

3. Pengaruh pemahaman pengelolaan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan daerah serta efektivitas pengawasan intern pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan SKPD

Almada Primadona (2010) menyatakan bahwa pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama mempunyai korelasi yang cukup dan memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah dimana semakin baik pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintahan daerah. Sebaliknya, semakin tidak baik pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah maka, kinerja pemerintah daerah akan semakin buruk. Pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah tersebut masih tergolong ke dalam skor yang cukup erat. Hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih minim serta sarana dan prasarana masih kurang sehingga muncul tindak kecurangan yang mengakibatkan kinerja pemerintah daerah belum tercapai secara maksimal. Wawan dan Lia (2009) menyatakan bahwa pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat artinya pengawasan intern yang dilaksanakan efektif dan kontinyu mempengaruhi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan akan lebih baik dan sebaliknya.

H₄: Pemahaman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan efektivitas pengawasan intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan menggunakan instrument daftar pertanyaan (kuesioner). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan jumlah 32 SKPD. Populasi dalam penelitian ini merupakan sampel yaitu sebanyak 64 sampel karena dilakukan dengan menggunakan metode sensus.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pemahaman Pengelolaan Keuangan daerah (X_1)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang berisi hak dan kewajiban yang dinilai dari uang maupun barang yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Instrument ini mengikuti Permendagri 13 tahun 2005, Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 10 pertanyaan dengan skala Likert 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan mengikuti penelitian sebelumnya oleh Parintak (2015) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAP).

3. Efektivitas Pengawasan intern (X_3)

Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Mengikuti unsur –unsur yang dikemukakan oleh COSO serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Variabel ini diukur dengan 8 pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.

4. Kinerja Keuangan SKPD (Y)

Kinerja Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diartikan sebagai kemampuan dari masing-masing SKPD dalam Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 11 pertanyaan yang diadaptasi Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan diukur dengan skala Likert 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.

Hasil dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada objek penelitian. Dari 64 kuisisioner yang disebarkan, kuisisioner yang kembali sebanyak 52 kuisisioner, yang tidak lengkap sebanyak 7 kuisisioner dan yang tidak kembali sebanyak 5 kuisisioner.

Uji Validitas dan Reliabilitas

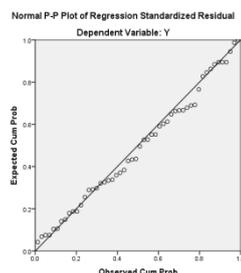
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil uji validitas untuk variabel pemahaman sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, efektivitas pengawasan intern dan kinerja keuangan pimpinan SKPD semuanya valid karena berada diatas nilai kritisnya $r_{tabel} = 0,444$. Uji reliabilitas diperoleh *Alpha Cronbach* = 0,922 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0.60 (Ghozali, 2001), sehingga variabel pemahaman sistem pengendalian, sistem akuntansi keuangan daerah, efektivitas pengawasan intern dan kinerja keuangan pimpinan SKPD (Y) dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik. Cara yang paling sederhana adalah dengan melihat grafik normal P-P Plot (Ghozali 2005).

Gambar 2 Grafik Normal P-P Plot



Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan antara variabel independen dalam satu persamaan regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki masalah multikolinearitas. Ada tidaknya multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali 2005). Berikut ini adalah tabel model regresi nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Tabel 1 Hasil Perhitungan Tolerance dan VIF

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.822	1.217
.794	1.260
.907	1.103

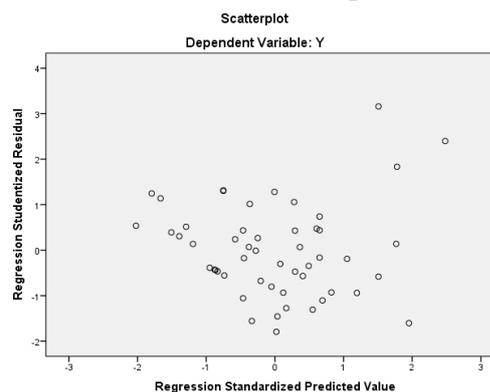
Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF Semua variable mempunyai nilai VIF < 10, artinya semua variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar (Ghozali, 2005) dalam Aidil (2010). Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Berikut ini adalah hasil dari grafik *scatterplot*:

Gambar 3 Grafik Scatterplot



Berdasarkan Gambar 3, gambar grafik dimana titik-titik yang ada dalam grafik tidak Membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan Dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2006) maka dapat disimpulkan bahwa Ttidak terjadi Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut Waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson bisa diambil patokan:

- Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.634 ^a	.402	.365	3.39426	1.985

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variabel: Y

Sumber : Hasil Olahan Data

Pada tabel 2, pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan tabel autokorelasi yang menyebutkan bahwa nilai uji Durbin Watson = 1,985 berada di daerah tidak ada autokorelasi -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi tersebut tidak terdapat masalah Autokorelasi.

Uji Hipotesis Penelitian

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan efektivitas pengawasan intern terhadap kinerja keuangan SKPD.

1. Pengujian Hipotesis Dengan Uji t

Hasil analisis regresi menunjukkan dari kedua variable independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD, koefisien regresi (β) variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) sebesar 46,3%, lebih besar daripada variabel efektivitas pengawasan intern (X_3) yang hanya sebesar 42,5%, sehingga dapat diketahui bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan lebih besar terhadap kinerja keuangan SKPD.

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t	Sig
Pemahaman pengelolaan Keuda (X_1)	0,309	1,950	0,057
Sistem Akuntansi Keuangan daerah (X_2)	0,463	2,350	0,023*
Efektivitas Pengawasan Intern (X_3)	0,425	2,823	0,007*
Konstanta	= 2,447		
R	= 0,634		
R square	= 0,402		
Adjusted R Square	= 0,365		
F hitung	= 10,753		
Signifikansi F	= 0,000		

Sumber: Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan table 5.10 pada hasil koefisien regresi (B) di table tersebut, maka Diperoleh Persamaan Regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.447 + 0,309X_1 + 0,463X_2 + 0,425X_3$$

2. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Dari analisis regresi berganda diperoleh nilai r sebesar 0,634. hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu variabel pemahaman pengelolaan keuangan daerah (x_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah (x_2) serta efektivitas pengawasan intern (x_3) mempunyai keeratan hubungan (korelasi) dengan variabel kinerja keuangan skpd (y) sebesar 0,634. Pada penelitian ini, untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan

dengan menggunakan besaran angka *R square*. Hasil *R square* didapat sebesar 0,402 (di peroleh dari pengkuadratan R yaitu = $0,634 \times 0,634$). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas yaitu variabel Pemahaman pengelolaan keuangan daerah (x_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah (x_2) serta efektivitas pengawasan intern (x_3) terhadap variabel kinerja keuangan SKPD (Y) sebesar 63,4%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Variabel Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah (X_3) terhadap Kinerja Keuangan SKPD (Y)

Hasil penelitian diketahui bahwa variabel pemahaman pengelolaan keuangan daerah (X_1) berpengaruh namun tidak secara signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD (Y), hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hidayat (2009) yang melakukan penelitian di kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa, pengelolaan keuangan daerah kabupaten padang pariaman berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut, dan Almada (2013) yang melakukan penelitian di Kota Bandung, menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan banyak pengelola keuangan pada pemerintah Kabupaten Bolmong Timur yang masih kurang memahami dengan perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan yang belum dilaksanakan dengan baik. Perubahan aturan dengan terbitnya Permendagri 64 tahun 2013 mewajibkan Pemerintah Kabupaten Bolmong Timur menggunakan akuntansi berbasis aktual sehingga perlu dilakukan sosialisasi/bimbingan teknis untuk menghindari kesalahan-kesalahan akibat dari perubahan aturan yang harus dipahami agar para pengelola keuangan mampu melakukan perbaikan yang menyeluruh disamping sikap kehati-hatian dari pengelola keuangan menjadi beban tersendiri dalam mengelola keuangan. Hal ini menjadi penyebab kurangnya pemahaman pengelolaan dengan benar, masih adanya rangkap tugas yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran, atau kepada operator SIMDA, sehingga tugas seorang PPK untuk memeriksa kebenaran dari setiap transaksi keuangan di SKPD tidak berfungsi sebagaimana mestinya perubahan yang begitu cepat pada aturan keuangan, (Azhar, 2007) yang membuat para pengelola keuangan sulit memahaminya. Untuk mengurangi permasalahan ini pemerintah daerah kabupaten boltim harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan lewat bimbingan teknis dan pelatihan akuntansi lainnya.

2. Pengaruh Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) terhadap Kinerja Keuangan SKPD (Y)

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan SKPD, sehingga dapat diketahui bahwa semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kemampuan Pemkab Bolmong Timur dalam pengelolaan keuangan daerah. Saat ini Pemkab Bolmong Timur menggunakan sistem akuntansi yang berbasis teknologi (SIMDA) memungkinkan para pengelola keuangan menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Bastian (2006) yang mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data keuangan dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan. Penggunaan SIMDA sebagai alat pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan mempermudah pengelola keuangan yang ada di SKPD untuk menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang lebih akurat, SIMDA dilengkapi dengan pembatasan pengeluaran, apabila sudah melebihi jumlah anggaran yang tersedia maka system akan menolak Pengeluaran tersebut hal ini. Implementasi system informasi keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pemerintahan terutama Pemkab Bolmong Timur. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Parintak (2015) dan Hidayat (2015) serta Azhar (2007) dan Warisno (2009) perangkat pendukung seperti system informasi akuntansi mempengaruhi kinerja SKPD, penelitian ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD.

3. Pengaruh Variabel efektivitas Pengawasan Intern (X₃) terhadap Kinerja Keuangan SKPD (Y)

Variabel efektivitas Pengawasan Intern berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bolmong Timur, semakin baik pelaksanaan pengawasan intern akan semakin baik pula kinerja SKPD. Pengawasan keuangan internal dilakukan oleh inspektorat dan sekaligus memberikan perbaikan dan pembinaan yang diperlukan apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, sehingga pegawai mau bekerja dengan giat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan program serta aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Arens (2003), pengawasan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen pengendalian intern pemerintah yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan / prestasi pengendalian intern pemerintah oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana.

4. Pengaruh Variabel efektivitas Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Efektifitas Pengawasan Intern X₄ terhadap kinerja keuangan SKPD (Y).

Variabel efektivitas pemahaman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan efektifitas pengawasan intern terhadap kinerja keuangan SKPD berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan SKPD pada pemerintah kabupaten Bolmong Timur, semakin baik pelaksanaan pengelolaan keuangan, sistem akuntansi dan pengawasan intern akan semakin baik pula kinerja SKPD. Pengelolaan keuangan yang baik akan berjalan searah dengan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang sesuai dengan prosedur dan langkah-langka yang sudah menjadi arah dan kebijakan pemerintah daerah, begitu pula pengawasan keuangan internal dilakukan oleh inspektorat dan sekaligus memberikan perbaikan dan pembinaan yang diperlukan apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, sehingga pegawai mau bekerja dengan giat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan program serta aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini sejalan dengan apa yang terungkap oleh Sopiah (2008), seorang pemimpin organisasi memiliki andil yang sangat besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Memahami perilaku Individu – individu dalam organisasi bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang pemimpin karna ada factor manusia yang ada dalam organisasi yang seringkali memunculkan masalah yang rumit dan sulit di pecahkan dibanding masalah – masalah yang bersifat teknis. Pada pemerintah kabupaten Bolmong Timur dapat menjadi acuan dalam memotivasi setiap individu-individu yang membawahi setiap seksi, sub bagian, staf, dalam mendorong ditaatinya semua aturan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atasan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, serta pengendalian internal akan berdampak efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan kinerja keuangan yang lebih baik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara simultan dari variable pemahaman pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, efektifitas pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemahaman Pengelolaan Keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Boltim.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Boltim.
4. Efektivitas Pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Boltim.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada pengelola keuangan daerah sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
2. Bagi pengelola keuangan daerah di Kabupaten Bolmong Timur untuk dapat mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
3. Bagi pimpinan SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang agar memiliki rasa tanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semakin baik tingkat kewajaran penyusunan laporan keuangan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD.
4. Bagi Bupati yang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD serta memberikan petunjuk teknis dalam mengelola APBD yang ada di SKPD masing-masing.

Daftar Pustaka

- Arens, A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2003 *Auditing and Assurance Service and Integrated Approach*. 9th Edition. New Jersey. Prentice Hall International Inc.
- Almanda Primadona. 2013. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung, e-journal Universitas Indonesia.
- Erna Sari, Saiful dan Nila Aprilia. 2013. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelola keuangan Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 3, 2013.
- Freeman, J. Robert and Craig D. Shoulders. 2004. *Governmental and Nonprofit Accounting*. New Jersey. Pearson Education.Inc.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Cetakan IV*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Wawan Sukmana, Lia Anggarsari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..*Jurna lAkuntansi FE Unsil*, Vol. 4, No. 1, 2009.